

DAFTAR PUSTAKA

- Biswan, A. T., & Mahrus, M. L. (2020). *Praktik Akuntansi Keuangan Menengah (edisi ke-4)*. Tangerang Selatan: PKN STAN Press.
- CV Kartika Sejahtera. (2013). Summary CV Kartika Sejahtera. Diambil kembali dari Indokontraktor.com: <https://indokontraktor.com/business/cv-kartika-sejahtera>
- Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2017). *Permasalahan kontrak konstruksi*
- Hansen, S. (2017). *Quantity Surveying: Pengantar Manajemen Biaya dan Kontrak Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)(edisi ke-4)*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 Revisi 2014 tentang Pendapatan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV Andi.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate accounting, IFRS 3rd edition*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
- Manegeng, P. N., Pusung, R. J., & Sondakh, J. J. (2017). *Analisis Pengakuan, Pengukuran, dan Pengungkapan Pendapatan Menurut SAK ETAP Pada PT Metta Karuna Jaya*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.
- Niswonger. (2006). *Prinsip - Prinsip Akuntansi (Edisi ke-19)*. Diterjemahkan oleh Alfonsus Sirat. Helda Gunawan. Jakarta: Erlangga

- Putra, Andrian Eka. (2020). *Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban Jasa Konstruksi Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada CV Tetap Tegar Mandiri*. Riau: Islam Kuantan Singingi University Press.
- Republik Indonesia. 1994. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Suroto. (2000). *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.